

PERAN DAN FUNGSI MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BANK PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Asyari Hasan*

Abstract: *Shariah Banks as Islamic financial institutions and as the indicators of Islamic economic strengths should not depend upon the power of Islamic emotions and capital only in their efforts to develop themselves. In fact, there are many things that they can do. One of which is by strengthening social capital, as what is believed by world funding boards, such as IMF and World Bank, in order to minimize crises and increase the economic condition of the community.*

Kata kunci: social capital, trust, islamic product, financial, Islamic windows, economics capital, human capital

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu ekonomi berfungsi untuk meneliti, mempelajari dan menganalisa berbagai kesulitan yang muncul di saat manusia berkeinginan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas. (Said Sa'ad, 2004: 34) Perubahan sistem ekonomi dunia akhir-akhir ini ditandai dengan datangnya model ekonomi yang ditawarkan para cendekiawan muslim yang menganggap ekonomi yang didominasi sistem kapitalis dan sosialis ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam membentuk kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Sistem baru ekonomi tersebut dianggap sebagai alternatif "the thirt way" bernama ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan keadilan dan bebas bunga. (Ashraf Muhammad, 2006: 5)

Perubahan sistem tersebut merebah ke sektor ekonomi secara menyeluruh, termasuk perubahan sistem perbankan. (Nejatullah, 2007: 133-134) Dalam perekonomian zaman modern ini kegiatan ekonomi tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, (Adiwarman Karim, 2003: 17) sebab perbankan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi perekonomian bangsa negara dan masyarakat secara umum.

Dewasa ini, model perbankan bukan lagi milik *ansich* dari sistem konvensional, namun sistem baru ekonomi Islam telah membentuk lembaga perbankan yang berasaskan prinsip-prinsip dan arsitektur Islam pula yaitu bank tanpa bunga, (Ziauddin Ahmed, 1983: 8). Di Indonesia kedua sistem tersebut telah menjadi bagian dari per-

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah pada STAIN Batusangkar

ekonomian di tengah-tengah masyarakat.

Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dapat berdasarkan konvensional atau menganut sistem syariah dan *dual banking system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara dalam Undang-Undang, Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak: (Undang-Undang RI No 21, 2008)

Bank Islam atau bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. (Jamal ad-Din 'Attiyah, 1986: 79, Edwin Nasution, 2010: 2). Tujuannya secara umum adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang

terkait. (Zainul Arifin, 2003: 12). Bank syariah dikembangkan dengan menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. (D. Schaik, 2001: 45-52)

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

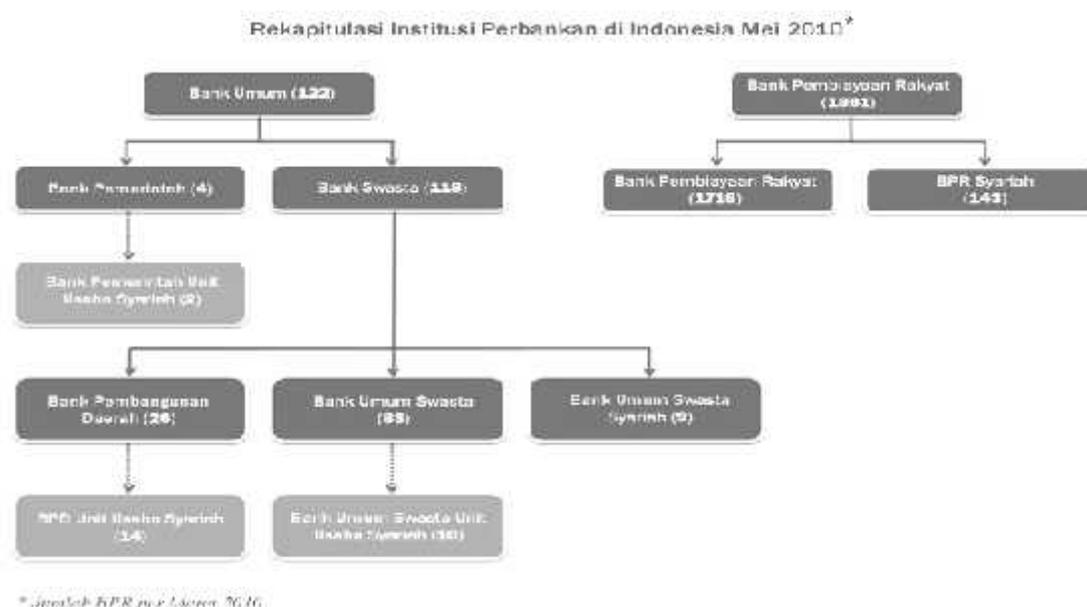
Perkembangan bisnis bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik sejauh ini, namun belum begitu menggembirakan. Dukungan permintaan "*islamic product*" yang solid dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia sesungguhnya menjadi potensi besar bagi perbankan syariah. Namun jika dibandingkan perkembangannya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia masih sangat ketinggalan. Padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang besar ini seharusnya secara rasional merupakan potensi dan merupakan basis yang kuat untuk perkembangan bank syariah di Indonesia ke depan namun belum digarap secara maksimal.

Bank syariah dapat dilakukan dan didirikan melalui Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), *Islamic windows* dan *office channeling*. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum pendiriannya adalah Perseroan

Terbatas (PT), koperasi atau perusahaan daerah dengan modal disetor sekurang-kurangnya 1 triliun rupiah. Sedangkan BPRS adalah bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bentuk pendiriannya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau perusahaan daerah, dengan modal di setor untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta minimal 2 milyar rupiah, daerah Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor modal disetor minimal 1 milyar rupiah dan daerah lain di Indonesia selain yang

disebutkan di atas modal disetor minimal 500 juta. (Adrian Sutedi, 2001: 50)

Berdasarkan data Bank Indonesia bulan April tahun 2010 BPR Syariah di Indonesia berjumlah 143 unit. Sementara perbankan yang murni melakukan kegiatan usaha syariah berjumlah 9 unit dan perbankan konvensional yang membuka unit usaha syariah berjumlah 26 unit, sebagaimana dalam tabel berikut: ([Http:// www. BI. go. id/](http://www.BI.go.id/)).



Sejak bank syariah didirikan di Indonesia, yang dimulai oleh Bank Muamalat pada tahun 1992, keberadaan perbankan syariah sesungguhnya masih kecil bila dibandingkan bank konvensional. Apalagi jika dilihat dari perbandingan BPR konvensional dengan BPR Syariah, perbedaannya sangat mencolok 1817 dibanding 143. Padahal sesungguhnya

keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat menengah kecil yang didominasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan sangat cocok dengan jargon utama ekonomi Islam yang berbasis pada kekuatan ekonomi ummat dan *jama'ah* yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan bereko-

nomi. (Husain Hamid Mahmud, 2000: 238-240)

Salah satu ciri khas lembaga keuangan Islam adalah kaitannya yang erat dengan sektor riil, sebab dalam sistem non-ribawi, penghasilan lembaga keuangan tergantung dari keuntungan yang dibagihasikan secara proporsional, terutama yang bersumber dari nilai-tambah yang diciptakan oleh sektor riil, khususnya pertanian dan industri. (Muhammad Yunus, 2007: 156-157) Karena itu, maka pertumbuhan perbankan lembaga keuangan mikro syariah perlu ditunjang dengan pengembangan bisnis yang tidak hanya terpaku pada emosional keislaman semata, yang ternyata tidak terbukti. Jika memang kebanyakan nasabah yang menggunakan bank syariah berdasarkan alasan emosional keislaman maka dalam 18 tahun keberadaan bank syariah di Indonesia seharusnya sudah berkembang pesat, sebab penduduk Indonesia lebih kurang 82% merupakan masyarakat beragama Islam, oleh karenanya alasan emosional keislaman untuk memilih bank syariah tidak tepat lagi makanya seluruh komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi harus dikaji dan dijadikan tolak ukur dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. (Akhyar Adnan dan Muhammad, 2002: 60)

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang banyak kalangan melakukan kajian dan analisa dengan alasan pengembangan perbankan tersebut. IMF sebagai salah satu lembaga keuangan dunia juga telah melakukan

berbagai kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Sedangkan bank dunia beberapa kali membiayai dan memberikan perhatian lebih dalam bidang penelitian terhadap kelembagaan perbankan berkaitan dengan modal sosial sebagai salah satu jalan menuju keluar dari krisis perbankan dan keuangan di beberapa negara. Hasil-hasil penelitian tersebut dikumpulkan dalam sebuah buku oleh Anthony J Bebbington dalam *The Search For Empowerment Social Capital and Practice at The World Bank*, (2006). Jorge E Uquillas dan Martin Van Niekoop melakukan penelitian di ekuado, (2005) David Lewis dan M. Sameen Siddiqi, meneliti di Banglades. Dari keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa minimnya keinginan para pengusaha menengah untuk menggunakan bank sebagai mitra ekonomi, bahkan masyarakat yang bertatap hidup rendah sangat tidak peduli dengan lembaga-lembaga mikro keuangan. Hal ini disebabkan karena kehidupan sosial mereka yang sangat unik dan sangat kuat dengan tradisi etnik yang ada pada bagian besar masyarakatnya, karenanya peneliti mengganjurkan perlu adanya pemberian pemahaman secara bijaksana pada masyarakat tersebut

dengan menjadikan pendekatan budaya sebagai alat pengembangan, serta lembaga keuangan perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan membuka fasilitas dan jaringan-jaringan ekonomi.

Dalam masyarakat ekonomi yang memiliki ketrlekatan budaya yang sangat tradisional serta masyarakat bertaraf ekonomi yang masih rendah memiliki kehidupan sosial yang sangat tinggi dibandingkan masyarakat kota. Sehingga pengembangan ekonomi harus mengikutsertakan peran budaya masyarakat, termasuk untuk megobah pola pikir masyarakat yang sebagian masih sangat tradisional dalam berekonomi. Jangankan untuk menggunakan bank sebagai mitra usaha, mereka sendiri tidak punya pola pikir maju untuk meningkatkan taraf hidup, karenanya negara dan stakeholder ekonomi perlu kiranya merangsang etos kerja dan pembangunan pemahaman ekonomi dengan menjadikan modal sosial sebagai mitra dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan Bank Dunia menilai bahwa perlu adanya penguatan modal sosial untuk meningkatkan perekonomian terutama dalam sektor keuangan. Sebab modal sosial dapat mengurangi dampak dari ketidaksempurnaan pasar yang dihadapi oleh para pedagang. Modal sosial juga dapat mereduksi tingginya biaya transaksi melalui relasi dengan pedagang lain yang dapat membantu dalam transaksi, relasi dengan orang-orang yang dapat membantu jika menghadapi kesulitan karena bisnis dengan resiko yang besar (*high risk*), dan relasi keluarga (*family relationship*) yang dapat

mengefesisensi dan mereduksi kesalahan-kesalahan dalam menilai kualitas barang. (Syahyuti, 2008: 24)

MEMPERKUAT MODAL SOSIAL

Bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan rekonstruksi paradigma dan juga kembali ke *khittah*. Bukan berarti ada kesalahan fatal pada paradigma terdahulu. Namun, paradigma perbankan syariah sebagai lembaga bisnis semata sudah seharusnya diubah menjadi paradigma sosial-ekonomi dalam naungan bisnis yang profesional sehingga perbankan syariah menjadi lembaga yang benar-benar bersahabat bagi masyarakat sekaligus berperan dalam pembentukan modal sosial.

Komponen-komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan perlu dikembangkan, dikaji kembali dan dijadikan sebagai wadah pengembangan lembaga keuangan Islam terutama perbankan syariah. (Sahal Mahfudh, 1994: 150) Sebab kekuatan modal secara materi yang selama ini dianggap *mainstream* utama ekonomi konvensional dalam mengukur kesuksesan seseorang, lembaga ekonomi maupun lembaga keuangan, mengakar sampai pada pengembangan lembaga keuangan Islam, tidak bisa dipungkiri bahkan setengah dari model perbankan Islam sesungguhnya mengadopsi sistem perbankan konvensional. Padahal Ideologi kapitalis yang berdasarkan pada kekuatan modal semata sesungguhnya bertentangan dengan Islam. Kapitalisme berintikan pada bebasnya kepemilikan setiap individu tanpa batas-batas tertentu, sehingga setiap pemilik

modal dapat berbuat sewenang-wenang tanpa memperdulikan posisi ekonomi kaum miskin yang pada gilirannya akan memunculkan watak individualisme dan monopoli. (Adam Smith, 1937: 128)

Sebagaimana dikritik oleh Bourdieu terhadap terminologi modal (*capital*) di dalam ilmu ekonomi konvensional, modal sesungguhnya bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu: modal ekonomi (*economic capital*), modal kultural (*cultural capital*), dan modal sosial (*social capital*). Modal ekonomi, dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural, terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Modal sosial, terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial. (Pierre Bourdieu, 1985: 80) Penting juga diketahui bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi, karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal *immaterial* berbentuk modal budaya atau modal sosial. Konsep modal sosial dalam ilmu sosial sebagai alat yang sistematis untuk menjelaskan fenomena pertamakali diusung dan dilakukan oleh James Coleman tahun 1998, kemudian konsep tersebut semakin dipopulerkan oleh Putnam tahun 1993, 1995, 1999, Fukuyama tahun 1995 dan ilmuwan sosial lainnya. Rahmat Rais, 2009: 114)

Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak

hanya berwujud materi, alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa *human capital*. Sistem perekonomian dewasa ini yang didominasi oleh peranan *human capital*, yaitu 'pengetahuan' dan 'ketrampilan' manusia dianggap kurang mampu untuk meningkatkan perekonomian secara utuh. Kandungan lain dari *human capital* selain pengetahuan dan ketrampilan adalah 'kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain'. Kemampuan ini akan menjadi modal penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Modal yang demikian ini disebut dengan 'modal sosial' (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (James Coleman, 1998: 95-s120)

Dalam rumusan Robert D. Putnam, modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut. Putnam menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam

suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkoordinasi. (Robert. D. Putnam, 1993: 67)

Semakin mengemukanya pemerhatian terhadap keberadaan potensi dan peran penting modal sosial di dalam sistem perekonomian dewasa ini, mulai terjadi ketika para pakar dan pelaku ekonomi mulai merasakan adanya sejumlah kegagalan dan kegagalan implementasi 'mazhab ekonomi neo-klasik' yang pro-globalisasi dan pro-liberalisasi perdagangan dalam menata perekonomian dunia baru dewasa ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Fukuyama bahwa perkembangan ekonomi dunia dewasa ini didera oleh banyak penyakit.

Hal ini menjadi salah satu alasan di mana Bank Dunia mencoba untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi (Anthony J. Bebington, 2005: 63) melalui pendekatan modal sosial. Bank Dunia meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Maka integrasi sosial merupakan kecenderungan untuk saling menarik, tergantung dan menyesuaikan diri, perlu dilakukan dengan memfungsikan modal sosial. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Bank dunia mencoba modal sosial sebagai pendekatan untuk menumbuhkan serta meningkatkan perekonomian negara-negara dunia ketiga dan sedang berkembang. Dengan klasifikasi ini kemudian Bank Dunia memberikan pinjaman keuangan kepada negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Bank dunia menklasifikasikan negara ke dalam empat kategori yaitu: negara-negara berpendapatan rendah (*low income*), berpendapatan menengah (*middle income*), berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*), dan berpendapatan tinggi (*high income*), (Ismail Nawawi, 2009: 13)

Ajaran Islam merupakan sumber modal sosial yang sangat *completable* jika dikaji dan ditelusuri secara mendalam, misalnya dalam ajaran Islam selalu ditekankan untuk selalu amanah (*trust*) *ta'awun* (*cooperation*), saling mengenal (*ta'aruf*), memperbanyak silaturahmi (*networking*) sebagainya. Hanya saja ajaran-ajaran itu belum diinterpretasikan sejalan dengan pemikiran ekonomi dan pembangunan. Bahkan sistem perekonomian Islam belum melaksanakannya secara komprehensif dalam perilaku sosial dan kelembagaan mereka. Padahal, seharusnya modal sosial dapat dijadikan sebagai modal alternatif dalam penegembangan ekonomi Islam termasuk struktur perbankan, sebab modal sosial, berdasarkan pengalaman negara-negara industri maju sekarang ini, merupakan dasar dari kemajuan. (Francais Fukuyama, 1995: 89)

Postulat *naqliyah* ajaran Islam yang koheren dengan modal sosial terdokumentasikan dengan baik 15

abad silam. Kala itu, masyarakat Madinah dididik membangun dan menjunjung masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani atau *civil society*; masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. (Nana Mintarti, <http://www.masyarakatmandiri.org/>)

Modal sosial merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan ekonomi dan sosial dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan kehidupan berekonomi secara luas. Jika digunakan secara tepat modal sosial serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. (Ahmad Erani, 2006: 214)

Melihat hakikat dari modal sosial tersebut dapat dicermati apabila memberi ruang dan peluang yang cukup baik dalam optimalisasi peran pengembangan perbankan syariah terutama BPR Syariah yang dilakukan di Indonesia. Dengan adanya upaya mensinergikan suatu program pemberdayaan ekonomi

dengan modal sosial yang ada pada masyarakat, mitra ekonomi dan target pengembangan perbankan berdasarkan syariah tentunya akan memberi suatu pencapaian yang lebih baik dan maksimal sesuai target dan tujuan ekonomi Islam itu sendiri.

PENUTUP

Agar bank syariah dapat berkembang dan bisa bersaing dengan perbankan lainnya perlu dilakukan perhatian terhadap khusus sosial kemasayarakatan masyarakat sekitar dimana perbankan tersebut berada. Sebab latar budaya dan aspek *culture* masyarakat satu dengan lainnya tentunya berbeda. Bank syariah tidak seharusnya hanya mengedepankan kekuatan modal *financial* sebagai dasar pengembangannya namun cara-cara lain yang lebih ramah dan cocok lingkungan seperti modal sosial perlu diaplikasikan dalam roda operasional sehingga kemajuan perbankan dapat tercapai sesuai target dan programnya. Jika Bank dunia dan IMF yang merupakan "maskot" lembaga keuangan kapitalisme modern saja melakukan bagaimana dengan perbankan syariah yang mensinyalir lembaga pemberdayaan ekonomi umat tidak menerima, mengembangkan dan mencobanya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'At{iyah, Jamal ad-Din, *al-Bunuk al-Islamiyyah baina al-Hurriyyah wa at-Tanzim wa at-Taqlid wa al-Ijtihad an-Nazariyah wa at-Tatbiq*, Qatar: Dar al-Kutub al-Qatariyyah, 1986
- Ahmed, Ziauddin and Others, *Money and Banking In Islam*, Islamabad: Institute of Policies Studies, 1983
- Amin, Masyhur (ed), *Publikasi II: Pengantar ke Arah metodologi Penelitian dan Pengembangan ilmu Pegetahuan Agama Islam*. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan kaijaga, 1992
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Shar'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003
- Bebington, J Anthony .and others, *the Search For Empowerment Social Capital as Idea and Parctice at The World Bank*, Bloomfield: Kumarian Press, 2005
- Bourdieu,. Pierre, *the Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. ed. John Richardson. New York: Greenwood, 1985.
- Coleman, James, *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Newyork: American Journal of Sociology, 1998.
- Craf, Gorys. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah, 1989
- Dawabbah, Ashraf Muh{ammad, *Sanadiqu al-Istimthar fi al-Bunuk al-Islamiyyah Baina an-Nazariyah wa at-Tatbiq*, Qahirah: Dar as-Salam, 2006
- Fukuyama, Francais, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press. 1995
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003
- Mahmud, Husain Hamid, *an-Nizam al-Mali wa al-Iqtisad fi al-Islam*, Riyad: Dar an-Nashr ad-Dawli, 2000
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004
- Muhamad, *Kontribusi Fundamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, Malang: Empat dua, 2009
- Muhammad, dan Akhyar Adnan, *Preferensi masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah di yogyakarta"*, Yogyakarta: Tp, 2002
- Narwoko, J. Dwi, Dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana, 2010
- Nawawi, Ismail, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam, Kajian Ekonomi dan Sosial* Budaya. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009
- Putnam, R., *Making Democracy Work: Civic Tradaition In Modern Italy*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993
- Rais, Rahmat, *Modal Sosial*

- Sebagai Starategi Pengembangan Madra-sah: Studi Kasus Madrasah Pada MAN I Surakarta.* Jakarta: Litbang dan Diklat Depag, 2009.
- Schaik ,D, *Islamic Banking.* tt: The Arab Bank Review, 2001
- Siddiqui, Nejatullah, *Banking Without Interest,* (Lahore: Shah Alam Market, 1997
- Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature and Cause Of The Wealth Of Nations,* New York: Modern Liberty, 1937
- Surtedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjaun dan Beberapa Segi Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2000
- Syahyuti, *peran modal sosial dalam perdagangan hasil pertanian,* Bogor: PASKP, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- [www. BI.go. id](http://www.BI.go.id)
- Yunus, Muhammad, *Bank al-Fuqara' al-Qurud al-Mutanahiyah as-Ssugra wa al-Ma'rakah Did al-Faqra fi al-'Alam,* Qahirah: Maktabah ash-Shuruq ad-Dawliyah, 2007
- Yustika, Ahamad Erani, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Startegi,* Jawa Timur: Bayumedia Publishing:, 2006